

Rivalitas KNIL dan PETA dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Tazkia Kamila Sofuan¹

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ tazkia.kamila.sofuan@gmail.com

* Corresponding Author; Tazkia Kamila Sofuan



Received 30 September 2022; accepted 30 Oktober 2022; published 30 Desember 2022

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sejak awal kemerdekaan yang disertai dengan berbagai macam lika-liku di dalamnya, kemudian menjelaskan tentang rivalitas PETA dan KNIL dalam tubuh TNI sehingga dapat diketahui penyebab dari terjadinya konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah dengan lima tahapan yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini yaitu rivalitas yang terjadi antara KNIL dan PETA dalam tubuh TNI disebabkan karena perbedaan pandangan dan pengalaman yang diperolehnya ketika menjalani pendidikan militer. Adanya kecurigaan di antara dua kubu tersebut menyebabkan sering terjadinya perdebatan terutama ketika pemilihan panglima tertinggi tentara Indonesia. Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu dapat mengetahui sistem yang diterapkan ketika pemilihan panglima tentara Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui bahwa rivalitas yang terjadi antara KNIL dan PETA dalam tubuh TNI tidak menyebabkan tentara Indonesia menjadi tercerai berai, namun tetap menjadi satu kesatuan utuh dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

KEYWORDS

KNIL, PETA, Sejarah Kemiliteran Indonesia

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan keadaan negara masih belum terbilang mapan, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Keadaan negara yang belum terstruktur secara sistematis tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan, ketegangan, dan muncul berbagai macam insiden yang terjadi di berbagai wilayah karena masih adanya kekuatan asing yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia baik itu secara *defacto* maupun *dejure*. Menurut Sudirman (dalam Supian dan Lagut 2020) insiden tersebut terjadi antara para pejuang Kemerdekaan Indonesia dengan bangsa penjajah yang berusaha ingin menguasai Indonesia kembali. Hal tersebut membuat seluruh elemen masyarakat berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia baik dari sisi darat, laut, maupun udara. Supaya permasalahan tersebut tidak terjadi secara berlarut-larut dan mengancam kedaulatan negara Indonesia maka pemerintah membentuk sebuah badan yang bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara baik dari gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan tersebut diberi nama BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya TNI Republik Indonesia.

Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bersifat militer bukan suatu hal yang mudah, karena ketika membentuk suatu badan yang utamanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara pasti akan diliputi oleh berbagai macam masalah di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa unsur yang harus tersusun secara sistematis mulai dari menentukan organisasi yang tepat, pemilihan pimpinan, dan jabatan fungsionaris yang ada di dalamnya sehingga berbagai permasalahan dan tantangan turut mewarnai kelahiran dari suatu badan yang akan direalisasikan untuk menjaga keamanan negara. BKR dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan

pertahanan negara Indonesia. Pada saat Indonesia belum merdeka yang masih dijajah oleh Belanda dan Jepang terdapat dua institusi militer yang dominan dimana nantinya akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinas ketentaraan Indonesia merdeka. Institusi tersebut yang kita kenal sebagai KNIL dan PETA. KNIL merupakan institusi militer yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan PETA merupakan institusi militer yang dibentuk oleh Jepang (Atno dan Utama 2018).

Setelah BKR berhasil dibentuk, kemudian dilakukan perubahan nama menjadi TKR. Pada awalnya BKR hanya sebatas badan atau sebuah korps pejuang bersenjata yang bertugas untuk menjaga ketentraman umum, sedangkan TKR statusnya telah dinaikkan menjadi tentara untuk menjaga keamanan dalam negeri. Dengan diubahnya nama tersebut dari segi strukturnya telah mengalami peningkatan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perwira-perwira didikan dari Belanda yang bergabung dalam BKR. Tentara bentukan KNIL dinilai memiliki kompetensi yang lebih unggul dibandingkan dari tentara bentukan PETA karena KNIL menjalani sekolah militer lebih lama sehingga dianggap memiliki kualifikasi yang lebih mumpuni dibandingkan PETA yang hanya berlangsung lebih singkat pendidikan militernya (Atno dan Utama 2018). Sehingga, para bekas opsir dari KNIL tersebut dinilai lebih berkompeten dan berpengalaman dalam menjalankan tugas-tugas staf (Susdarwono 2020). Oleh karena itu, para bekas opsir dari KNIL lebih memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas yang kaitannya dengan pengorganisasian dan perencanaan militer dibandingkan dengan tentara bekas opsir PETA.

Dalam tubuh internal TNI terdapat persaingan yang begitu ketat dari para tentara eks KNIL dan PETA. Berbagai macam hal menyertai lahirnya TNI ketika masa revolusi saat itu, sehingga menimbulkan ketegangan di dalamnya. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sejak awal kemerdekaan yang disertai dengan berbagai macam lika-liku di dalamnya, kemudian menjelaskan tentang rivalitas PETA dan KNIL dalam tubuh TNI sehingga dapat diketahui penyebab dari terjadinya konflik tersebut. Dengan demikian, proses pembentukan TNI sebagai badan yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara statusnya jelas dan dapat setara dengan badan militer yang ada di negara lain. Selain itu, untuk membuktikan bahwa rivalitas yang terjadi antara KNIL dan PETA dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia tidak menyebabkan tentara Indonesia menjadi tercerai berai, namun tetap menjadi satu kesatuan utuh untuk tetap menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (dalam Baihaqie dan Dyah 2018) langkah-langkah metode penelitian sejarah terdapat lima tahapan yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama, pemilihan topik kajian yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil topik tentang rivalitas tentara KNIL dan tentara PETA yang terjadi dalam tubuh TNI pada masa awal kemerdekaan. Tahap kedua, pengumpulan sumber atau yang dikenal dengan heuristik. Ketika peneliti telah menentukan topik kajian yang akan dikaji maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik melalui studi pustaka. Menurut Mardalis dalam (Rush 2020) studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam bantuan sumber kepustakaan seperti dokumen, majalah, buku, kisah sejarah, jurnal, dan lain-lain. Tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah yaitu kritik sumber. Kritik sumber merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas sumber sejarah yang digunakan karena, tidak semua sumber sejarah itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peneliti melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang digunakan menggunakan kritik eksternal, dan kritik internal. Kritik tersebut dilakukan untuk menilai bahwa sumber yang digunakan merupakan sumber yang otentik dan kredibel atau justru sumber yang palsu dan mengalami perubahan (Wasino dan Hartatik 2020, 71). Tahap keempat metode penelitian sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu proses menafsirkan sumber-sumber yang telah diperoleh oleh peneliti melalui proses analisis dan sintesis (Baihaqie dan Dyah, 2018). Proses analisis dan sintesis dilakukan dengan tujuan untuk menguji bahwa data yang digunakan

sebagai sumber tersebut layak digunakan atau tidak. Sumber tersebut kemudian dirangkai menjadi satu, karena fakta sejarah bersifat tunggal serta belum memiliki makna apapun apabila belum dikaitkan dengan fakta yang lain. Setelah dirangkai menjadi satu maka dapat menghasilkan pendapat sesuai dengan fakta yang ada dan saling berhubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain (Wasino dan Hartatik 2020, 99). Tahap kelima metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan tahapan dimana setelah memperoleh sumber sejarah dan telah dilakukan tahapan krtik sumber serta interpretasi maka hasil dari penelitian tersebut disajikan dalam bentuk narasi sejarah. narasi sejarah tersebut disusun secara sistematis dan kronologis berdasarkan rentetan waktu peristiwa sejarah yang kemudian menjadi analisis deskriptif (Atno dan Utama 2018).

3. Pembahasan

3.1 Corak Tentara KNIL dan Tentara PETA

Sebelum diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia terdapat dua institusi militer yang dibentuk oleh Belanda dan Jepang. Dua institusi militer tersebut nantinya akan memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan dan perkembangan militer Indonesia. Dua institusi tersebut sangat populer dan tidak asing ditelinga kita yaitu PETA dan KNIL. Pemerintah Belanda ketika menduduki Indonesia berusaha untuk memperkuat kedudukannya dengan berusaha untuk menghidupkan pemerintahan sipil di berbagai wilayah yang ada di Indonesia (Wardhana, dkk 2019). Apabila kita lihat berdasarkan usia pembentukannya maka KNIL merupakan badan institusi militer yang dibentuk terlebih dahulu ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia lebih lama dari Jepang sehingga badan institusi militer yang dibentuk oleh Belanda usianya lebih lama daripada bentukan Jepang. Masa pendidikan para anggota KNIL lebih panjang daripada PETA, sehingga kemampuan militer yang dimilikinya dinilai lebih mumpuni. Rasa solidaritas tinggi yang ada dalam diri para tentara KNIL membuat jiwa organisasinya sangat baik. Namun dibalik jiwa kesolidaritasannya tersebut terdapat sisi kelemahan yang ada dalam diri para tentara KNIL. Kelemahan tersebut disebutkan oleh Nasution (dalam Atno dan Utama 2018) diantaranya yaitu pada umumnya mereka tercerai-berai, selain itu para eks tentara KNIL menjadi buronan dari Jepang. Meskipun nantinya terdapat pengecualian yaitu para eks tentara KNIL yang orang pribumi akan dileburkan kedalam organisasi semi-militer Jepang atau setidaknya mereka menjadi pengajar pendamping dalam pendidikan militer milik Jepang. Selain itu, disampaikan oleh Anderson (dalam Atno dan Utama 2018) terdapat permasalahan penting dalam diri tentara KNIL yaitu ego, karena tentara KNIL kurang membuka interaksi sosial dengan kelompok lain, sehingga menyebabkan hambatan ketika para tentara eks-KNIL bertikai dengan para tentara eks-PETA maupun anggota militer lain.

Adanya kelemahan dalam tubuh tentara KNIL tersebut tidak sepenuhnya bahwa mereka memiliki sisi buruk saja, namun masih terdapat beberapa anggota KNIL yang berjiwa organisasi baik dan pada akhirnya menjadi pimpinan tentara militer Indonesia. Kedua tokoh tersebut yaitu Oerip Soemohardjo dan Didi Kartasasmita yang berjasa dalam pembentukan militer Indonesia. Oerip Soemohardjo merupakan seorang mayor (pangkat tertinggi orang pribumi dalam institusi militer KNIL) yang memiliki pengetahuan baik tentang keilmuan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh tentara militer Indonesia. Sedangkan, Didi Kartasasmita merupakan seorang militeristik yang condong pada perpolitikan, dan diketahui bahwasannya ia dekat dengan Otto Iskandardinata yang nantinya memiliki pengaruh ketika pembentukan BKR yang merupakan hasil dari sidang PPKI ke-3. Kedua tokoh tersebut juga memiliki jasa yang sangat berharga bagi pembentukan militer Indonesia, karena mereka berhasil untuk meyakinkan kembali para anggota eks-KNIL untuk bergabung dalam keanggotaan tentara Indonesia dan memilih untuk tidak bergabung kembali menjadi anggota KNIL ketika Belanda kembali berusaha untuk menduduki wilayah Indonesia.

Selain KNIL terdapat institusi militer bentukan Jepang yang nantinya turut bergabung dalam tentara Indonesia yaitu PETA (Pembela Tanah Air). Menurut Suwondo (dalam Gunadi, dkk 2022) PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 yang diumumkan melalui Osamu Seirei No. 44 oleh Jenderal Kumakichi Harada (Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16) kepada seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan tentara PETA tersebut juga dipelopori oleh tokoh-tokoh besar bangsa

Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, KH. Mas Mansoer, Raden Gatot Mangkoepraja, Ki Ageng Suryomartana, dan Haji Agus Salim (Gunadi, dkk 2022). Dibentuknya tentara PETA bertujuan untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan tentara Sekutu, namun rakyat Indonesia melihat bahwa pembentukan tentara PETA tersebut untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu para pemuda Indonesia menawarkan dirinya untuk bergabung menjadi anggota PETA, dan bersedia untuk turut berjuang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Para pemuda tersebut memiliki anggapan bahwasannya jika mereka bergabung menjadi bagian dari anggota PETA maka mereka akan memperoleh pendidikan militer dari bangsa Jepang yang dapat membangun pertahanan militernya. Sehingga, terbentuklah tentara sukarela yang berjiwa nasionalis dimana para anggotanya dari putra-putra terbaik Indonesia. Secara konsisten mereka dilatih oleh para tentara militer Jepang yang telah memiliki pengalaman di berbagai pertempuran di wilayah Asia khususnya kawasan Asia Tenggara.

Pembentukan tentara PETA menjadi sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Pada saat itu Indonesia menginginkan untuk memiliki tentara nasional yang terlatih yang merupakan impian besar bagi bangsa Indonesia. Saat itu kesadaran akan pentingnya memiliki kekuatan militer untuk mencapai kemerdekaan sangat diperlukan, karena tanpa adanya kekuatan dari tentara maka untuk mencapai kemerdekaan hanyalah suatu angan-angan saja. Ketika pembentukan tentara PETA antara kepentingan yang diterapkan oleh Jepang dan rakyat Indonesia sudah terlihat dengan jelas perbedaannya, namun masih terdapat kesamaan di dalamnya yaitu terbentuknya tentara sukarela. Untuk menjadi anggota PETA para pemuda harus mengikuti pendidikan kemiliteran. Latihan kemiliteran angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1943. Dimana pusat pendidikan perwira tentara PETA di pulau Jawa disebut dengan Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai yang merupakan bekas tangsi dan markas dari tentara KNIL. Pendidikan yang diperoleh oleh para calon tentara PETA yaitu sekitar 2-4 bulan, sehingga sejak saat itu di 20 Karisidenan yang terdapat di pulau Jawa, Madura, dan Bali mulai dibentuk Daidan (Batalyon). Pembentukan Daidan tersebut berhasil dilakukan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah perwira tentara PETA (Gunadi, dkk 2022).

Pendidikan militer yang diberikan oleh Jepang kepada para tentara PETA terbilang cukup singkat karena, ketika Jepang menduduki Indonesia hanya sekitar 3,5 tahun saja. Melalui pendidikan yang terbilang singkat tersebut, namun kemampuan tempur yang dimilikinya cukup mumpuni. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan militer yang diberikan kepada para tentara PETA sangat keras. Mereka dilatih kedisiplinan, sehingga apabila ada yang melanggar peraturan maka mereka akan mendapatkan sanksi dan hukuman. PETA sama seperti dengan KNIL yang memiliki keunggulan dan kekurangan dalam institusinya. Menurut Anderson (dalam Atno dan Utama 2018) keunggulan yang dimiliki oleh PETA yaitu dari segi fisik mereka terbilang sangat muda sehingga kuat dan enerjik. Hal itu dikarenakan para pemuda yang ingin bergabung dalam PETA harus berusia muda, memiliki hubungan baik dengan para atasan serta bawahan. Meskipun mereka dibentuk oleh Jepang namun jiwa nasionalisme yang dimilikinya sangat tinggi dan anti terhadap bangsa barat. Selama memperoleh pendidikan militer mereka juga memperoleh pengajaran mengenai nasionalisme yang diberikan oleh Soekarno secara langsung. Selain kelebihan, tentara PETA juga memiliki kekurangan yang sifatnya teknis yakni dalam hal organisasi. Terdapat hal yang dilupakan oleh Jepang ketika memberikan pendidikan militer pada pemuda Indonesia yaitu pengorganisasian. Jepang memang mendidik para pemuda Indonesia yang akan bergabung menjadi tentara PETA secara disiplin dan mumpuni dalam hal peperangan, namun ia mengabaikan pentingnya pengorganisasian di dalam kemiliteran itu sendiri. Menurut Simatupang (dalam Atno dan Utama 2018) hal itulah yang kemudian menyebabkan lemahnya organisasi ketentaraan Indonesia yang ditandai dengan berubahnya nama institusi militer Indonesia secara berulang kali yang semula dari BKR hingga menjadi TNI.

3.2 Tokoh-Tokoh KNIL dan PETA

Keanggotaan korps perwira PETA terdiri dari para golongan priyayi dan rakyat Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu tentara Belanda. Menurut Ricklefs (dalam Nugrahanto, dkk 2018)

ketika di akhir perang anggotanya berjumlah sekitar 37.000 orang di pulau Jawa, sekitar 20.000 orang di pulau Sumatra, dan sekitar 1.600 orang di pulau Bali. PETA mengusung kedisiplinan yang sangat ketat disertai dengan ide-ide nasionalis Indonesia untuk indoktrinasi para anggotanya. Pendidikan militer yang diberikan oleh Jepang bersifat keras baik itu dari segi fisik dan juga mental. Pendidikan kemiliteran yang diberikan oleh Jepang meliputi ilmu peperangan, taktik dalam bertempur, penggunaan senjata dengan baik, dan lain-lain yang berhubungan dengan kemiliteran (Munawaroh, dkk 2022). Kedisiplinan yang sangat kuat mengharuskan bagi setiap calon tentara PETA harus menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Seperti semua calon tentara harus mencukur rambutnya hingga gundul, wajib mengikuti senam pagi setiap hari, dan lain-lain. Apabila terdapat siswa yang melanggar maka akan dikenai hukuman dijemu sehari di bawah panasnya sinar matahari. Hukuman yang diberikan tidak hanya itu saja melainkan hukuman fisik seperti berdiri tegap dalam waktu yang cukup lama, tempelangan dari para tentara Jepang, lari jarak jauh, dan lain-lain. Selama menjalani pendidikan calon tentara tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat karantina. Setiap hari dalam kurun waktu 24 jam diatur secara tegas dan jelas sehingga, tidak ada waktu yang kosong dan akhirnya menjadi kebiasaan bagi seluruh calon tentara. Melalui pendidikan militer yang sangat ketat tersebut lahirlah sejumlah tokoh tentara PETA seperti Ahmad Yani, Soemitro, Soedirman, Sarwo Edhie Wibowo, Soeharto, Soeprijadi, dan lain-lain.

Bibit-bibit perwira yang nantinya akan menjadi tokoh militer tidak hanya berasal dari PETA saja, namun juga dari KNIL seperti Oerip Soemohardjo, A. H. Nasution, Didi Kartasasmita, Alex Kawilarang, dan TB Simatupang (Nugrahanto, dkk 2018). Ketika Belanda hendak melakukan perekrutan prajurit KNIL terdapat tiga jalur perekrutan pendidikan militer yang digunakan. Jalur pertama melalui institusi *Officieren School* yang didirikan pada tahun 1852 di Meester Cornelis, Batavia. Pendidikan militer yang harus ditempuh oleh para calon prajurit selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut yaitu selama tiga tahun. Salah satu alumni dari sekolah militer tersebut adalah Oerip Soemohardjo yang nantinya menjadi kepala staf umum TNI ketika masa revolusi. Jalur kedua melalui KMA (*Koninklijk Militaire Academie*) yang berada di Berda, Belanda. Salah satu tokoh yang nantinya menjadi tentara KNIL adalah Didi Kartasasmita. Menurut Sumarsono (dalam Nugrahanto, dkk 2018) ketika seorang calon perwira berkeinginan untuk menjadi tentara KNIL terdapat beberapa tes yang harus dijalani yaitu tes ujian tertulis, wawancara, menunggang kuda, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik yang dimiliki. Jalur ketiga, melalui CORO (*Corps Opleiding tot Reserve Offisieren*) yang merupakan akademi militer Breda cabang Bandung. Sekolah militer CORO tersebut dibuka ketika menjelang terjadinya peristiwa Perang Dunia II ketika Hindia Belanda dalam keadaan genting. Menurut Matanasi (dalam Nugrahanto, dkk 2018) melalui sekolah militer tersebut kemudian lahirlah beberapa perwira hebat seperti Alex Kawilarang, TB. Simatupang, Askari, A.H. Nasution, Mokoginta, Ahmad Yunus, dan Soeprapto.

3.3 Pemilihan Panglima TNI

Pemilihan panglima tentara pertama yang dilakukan di Indonesia sedikit berbeda dengan pemilihan panglima tentara yang dilakukan oleh negara-negara lain. Pemilihan panglima tentara di negara lain menggunakan sistem komando atau yang dikenal dengan komunikasi satu arah yang dilakukan dari atasan kemudian menuju ke bawahan, sedangkan pemilihan panglima tentara pertama Indonesia dilakukan dengan cara demokratis melalui voting (Nugrahanto dan Rina 2018). Demokratis apabila kita maknai secara terminologis memiliki arti bahwa dimana setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam mengambil keputusan. Demokrasi pada umumnya sering dikaitkan dengan pemilihan umum seperti pemilihan presiden, gubernur, kepala daerah, dan lain-lain. Memang sedikit berbeda ketika pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia dengan menggunakan sistem demokrasi dimana dalam institusi kemiliteran ketika melakukan pemilihan panglima tentara pada umumnya menggunakan sistem komando. Hal ini dinilai sebagai suatu peristiwa penting dan menarik dalam sejarah militer Indonesia, karena ketika pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia telah menerapkan demokrasi langsung dengan melalui voting. Pemilihan dengan menggunakan sistem demokrasi langsung mungkin memang masih jarang untuk kita temui pada saat itu, karena hanya baru dilaksanakan oleh para perwira TNI ketika menentukan panglima tertingginya, sedangkan elit-politik pada saat itu belum menerapkannya. Seiring berjalannya waktu demokrasi langsung mulai

diterapkan dalam dunia politik dan sebagainya. Penerapan demokrasi langsung telah dipraktekkan oleh kalangan militer ketika pemilihan panglima tentara pertama dan penerapan tersebut dinilai sangat tepat. Apabila saat ini para tentara mendukung diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia maka sudah tidak asing lagi, karena hal tersebut telah dicontohkan oleh para pendiri TNI pada saat itu.

Ketika pasukan Sekutu telah masuk ke wilayah Indonesia dan Indonesia belum memiliki panglima tentara tetap maka para perwira TKR melakukan desakan kepada pemerintah untuk segera mengisi kekosongan jabatan sebagai panglima tentara. Menurut Tjokropranolo (dalam Nugrahanto dan Rina 2018) pemilihan panglima tentara pertama Indonesia pada saat itu dilakukan melalui rapat besar dengan mengumpulkan semua panglima divisi serta resimen TKR. Rapat tersebut diselenggarakan di gedung markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat di daerah Gondokusuman, Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945 (Nugrahanto dan Rina 2018). Ketika rapat sedang berlangsung terdapat suatu kendala yaitu mengenai sistem pemilihan yang akan digunakan untuk memilih panglima tentara karena, masih belum terpikirkan proses pemilihannya. Kendala tersebut kemudian dapat diatasi dengan usulan dari Oerip Soemoharjo yang mengusulkan bahwa pemilihan panglima tentara dilakukan secara langsung atau secara demokratis. Disebutkan pada majalah *Historia* (dalam Nugrahanto dan Rina 2018) bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu seluruh peserta rapat ketika namanya dipanggil hanya cukup mengangkat tangannya kemudian menyebutkan nama kandidat yang dipilih menurut hati nuraninya masing-masing. Pemilihan secara langsung ini dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi suatu kecurangan dan kecurigaan antar peserta rapat sehingga, pemilihan dapat berjalan sesuai dengan harapan guna menentukan siapa tokoh yang paling tepat untuk memimpin para tentara kelak.

3.4 Dampak dari Adanya Rivalitas Antara KNIL dan PETA dalam Tubuh Tentara Indonesia

Sejarah pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) tidak dapat terlepas dari KNIL dan PETA institusi militer bentukan dari Belanda dan Jepang ketika masa penjajahan. Pada awalnya Indonesia masih belum memiliki tentara yang berperan dalam menjaga persatuan dan keamanan negara. Melihat kondisi tersebut pemerintah kemudian berkeinginan untuk membentuk satuan ketentaraan sendiri bagi Indonesia. Para bekas tentara KNIL dan PETA kemudian bergabung menjadi bagian dari tentara Indonesia yang justru nantinya terjadi pertarungan dalam tubuh TNI itu sendiri. Ketika awal dibentuknya tentara militer Indonesia yang diberi nama BKR (Badan Keamanan Rakyat) bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Kemudian, dilakukan perubahan akronim nama tentara Indonesia menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pada awalnya BKR hanya sebatas badan atau sebuah korps pejuang bersenjata yang bertugas untuk menjaga ketentraman umum, sedangkan TKR statusnya telah dinaikkan menjadi tentara untuk menjaga keamanan dalam negeri. Dengan diubahnya nama tersebut dari segi strukturnya telah mengalami kebaikan (Susdarwono 2020).

Rivalitas yang terjadi antara bekas tentara KNIL dan bekas tentara PETA dalam tubuh tentara Indonesia disebabkan karena perbedaan pandangan dan pengalaman yang diperolehnya ketika menjalani pendidikan militer. Bekas tentara KNIL beranggapan bahwa mereka yang memperoleh didikan dari Belanda lebih memiliki profesionalitas, karena seorang militer seharusnya mengabdikan kepada pemerintah sipil. Hal ini dikarenakan pemerintah sipil telah memperoleh dukungan dari para politisi dan kaum cendekiawan yang berorientasi terhadap gagasan demokrasi liberal. Sedangkan, bekas tentara PETA yang memiliki pandangan berbeda menurut pendapat Britton (dalam Widaningsih 2018) bahwa seorang militer harus memiliki keberanian dan kedudukannya tergantung pada penilaian bawahannya. Para tentara PETA juga harus mempertahankan prinsip ketika kita ingin mengatasi teknologi unggul maka kita harus menjadi orang yang terlatih, memiliki tekad penuh, serta pengabdian. Para tentara bekas didikan Jepang profesionalisme yang dimiliki terhadap penguasa hanya terbatas pada tuntutan perkembangan teknologi serta peperangan modern dengan mengedepankan ideologi bentukan dari Jepang, sehingga mereka beranggapan bahwa militer tidak harus taat dan patuh kepada pemerintah sipil.

Kepemimpinan yang ada di dalam TKR (Tentara Keamanan Rakyat) banyak dipegang oleh para bekas tentara KNIL. Hal ini disebabkan karena bekas tentara KNIL dianggap memiliki profesionalisme yang tinggi karena pendidikan militer yang dijalannya lebih lama dibandingkan dengan tentara bekas PETA. Bekas tentara PETA ketika memperoleh didikan dari Jepang hanya memiliki pengalaman memimpin pasukan sampai batalion saja dan tidak pernah memperoleh pengalaman pimpinan hingga tingkat atas (Setyahadi 2018). Selain itu, sering timbul kecurigaan antara bekas tentara KNIL dan bekas tentara PETA ketika menjadi pimpinan militer, serta saling berebut menguasai senjata. Adanya kecurigaan di antara dua kubu tersebut menyebabkan sering terjadinya perdebatan terutama ketika pemilihan panglima tertinggi tentara Indonesia. Mereka menganggap bahwa setiap kubu mereka lebih baik dan berhak untuk mengemban jabatan sebagai seorang panglima tentara Indonesia.

Pada saat pembentukan TKR, bekas mayor KNIL Oerip Soemohardjo diangkat menjadi kepala markas besar umum TKR. Hal itu menuai kontra dari kalangan PETA yang utamanya berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur muncul perasaan yang tidak senang terhadap bekas tentara KNIL (Susdarwono 2020). Sehingga Oerip Soemohardjo gagal untuk diangkat menjadi panglima tentara, sehingga jabatan tersebut diserahkan kepada Soeprijadi yang merupakan seorang pemimpin legendaris dan pemberontakan PETA di Blitar. Akan tetapi pengangkatan tersebut ternyata hanya simbolis saja, karena sejak pemberontakan PETA yang terjadi di Blitar pada bulan Februari membuat jejaknya Soeprijadi menjadi hilang dan tidak pernah terlihat kembali. Akibat hal tersebut menyebabkan kosongnya jabatan panglima tentara. Kekosongan jabatan panglima tentara menyebabkan terjadinya keinginan untuk mengangkat seorang panglima baru untuk menggantikan Soeprijadi. Hal tersebut menurut Tjokropranolo dalam (Susdarwono 2020) perlu dilakukan pengangkatan panglima tentara yang bertugas untuk mengayomi serta memberikan pengarahan kepada seluruh anggota TKR. Dikarenakan pada saat itu tentara sekutu telah masuk ke daerah-daerah pedalaman untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan para tawanan sekutu. Permintaan untuk melakukan pengangkatan panglima tentara tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah sehingga, Oerip Soemohardjo segera melakukan tindakan sendiri dengan mengundang seluruh panglima divisi dan resimen TKR untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat tersebut diselenggarakan di gedung markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat di daerah Gondokusuman, Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945 (Nugrahanto dan Rina 2018).

Rapat yang diselenggarakan di Yogyakarta dilakukan dengan tujuan untuk memilih panglima tentara dan menteri pertahanan. Ketika rapat berlangsung terdapat beberapa tokoh yang diusulkan untuk menjadi kandidatnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Widjoyo Soerjokoesomo, GPH Poerbonegoro, Oerip Soemohardjo, Soedirman, Soerjadharma, M. Pardi, dan Nazir. Pemilihan dilakukan dengan sistem demokrasi langsung melalui voting. Hasil pemilihan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Soedirman terpilih menjadi panglima tentara dan Sri Soeltan Hamengkubuwono IX terpilih menjadi menteri keamanan rakyat. Oerip Soemohardjo sebenarnya berkeinginan untuk memperoleh jabatan tersebut sebagai suatu legitimasi untuk memimpin TKR dan para tentara yang hadir pada saat itu. Akan tetapi, pada kenyataannya Soedirmanlah yang memperoleh suara terbanyak untuk menempati jabatan sebagai panglima tentara dan memperoleh legitimasi dari mayoritas tentara yang hadir untuk menjadi pimpinan TKR. Melihat hasil pemilihan tersebut maka Oerip Soemohardjo harus mengakui kekalahannya dan menerima dengan lapang dada bahwa Soedirmanlah yang menjadi panglima tentara Indonesia.

Pada awalnya terdapat beberapa tokoh yang kurang setuju dengan hasil rapat yang diselenggarakan di Yogyakarta tersebut yaitu Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir (Nugrahanto dan Rina 2018). Mereka berpendapat bahwa seharusnya Oerip Soemohardjolah yang berhak memperoleh jabatan sebagai panglima tentara, karena melihat dari latar belakang pendidikan militer yang dimilikinya. Oerip Soemohardjo merupakan bekas tentara KNIL yang memperoleh pendidikan militer dari Belanda di *Officieren School* yang didirikan pada tahun 1852 di Meester Cornelis, Batavia. Hal tersebut yang kemudian membuat Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir menyayangkan ketika Oerip Soemohardjo tidak terpilih menjadi panglima tentara Indonesia, karena dianggap memiliki kualifikasi lebih unggul sebab pendidikan militer yang dia peroleh lebih matang. Selain itu, Sutan Sjahrir juga menyatakan bahwa dia sebagai perdana menteri berhak untuk mengangkat menteri-

menteri dalam kabinetnya dan berkeinginan supaya Amir Sjarifudin yang menerima jabatan sebagai menteri keamanan rakyat bukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut pendapat Notosusanto (dalam Nugrahanto dan Rina 2018) untuk menghadapi situasi semacam itu Soekarno bertindak menjadi penengah dan mengambil keputusan supaya Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir harus mengakui hasil dari rapat yang telah diselenggarakan di Yogyakarta tersebut. Setelah Soekarno bersikeras selama kurang lebih satu bulan untuk meyakinkan Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir, pada akhirnya keduanya mau menerima hasil dari rapat tersebut dengan syarat bahwa Oerip harus tetap menjabat sebagai kepala staf. Apabila keputusan yang diambil dari rapat di Yogyakarta tidak diterima dengan baik, maka dikhawatirkan tentara menjadi tidak setia kepada pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, Jenderal Soedirman resmi diangkat menjadi panglima tentara Indonesia pada saat itu dengan kepribadiannya yang dikenal sebagai seorang pejuang sejati dan tidak mudah menyerah dalam berjuang melawan kekuatan asing untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika militer Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soedirman dan Letnan Oerip Soemohardjo memberikan dampak positif bagi perkembangan militer Indonesia pada masa awal pembentukannya (Susilo 2018).

4. Kesimpulan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia berhasil diproklamasikan, Indonesia belum memiliki tentara militer yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan dari berbagai macam serangan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia keadaan negara masih belum terbilang aman karena masih banyak kekuatan asing yang masih menginginkan Indonesia untuk menjadi negara koloninya. Untuk menjaga keamanan dalam negeri dari pengaruh pihak asing, maka pemerintah memutuskan untuk dibentuknya suatu organisasi militer bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bersifat militer bukan suatu hal yang mudah, karena ketika membentuk suatu badan yang utamanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara pasti akan diliputi oleh berbagai macam masalah di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa unsur yang harus tersusun secara sistematis mulai dari menentukan organisasi yang tepat, pemilihan pimpinan, dan jabatan fungsionaris yang ada di dalamnya sehingga berbagai permasalahan dan tantangan turut mewarnai kelahiran dari suatu badan yang akan direalisasikan untuk menjaga keamanan negara. BKR dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Pada saat Indonesia belum merdeka yang masih dijajah oleh Belanda dan Jepang terdapat dua institusi militer yang dominan dimana nantinya akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinas ketentaraan Indonesia merdeka. Institusi tersebut yang kita kenal sebagai KNIL dan PETA. KNIL merupakan institusi militer yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan PETA merupakan institusi militer yang dibentuk oleh Jepang. Rivalitas yang terjadi antara bekas tentara KNIL dan bekas tentara PETA dalam tubuh tentara Indonesia disebabkan karena perbedaan pandangan dan pengalaman yang diperolehnya ketika menjalani pendidikan militer. Akan tetapi, rivalitas yang terjadi di antara keduanya tidak menyebabkan tentara Indonesia menjadi tercerai berai, namun tetap menjadi satu kesatuan utuh untuk tetap menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Referensi

- Atno, dan Nanda Julian Utama. 2018. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7 (1): 12-18.
- Gathut Imam Gunadi, Beny Budhi Septyanto, dan Unggul Satrio Yudhotomo. 2022. "PERAN PENTING TENTARA SUKARELA PEMBELA TANAH AIR (PETA) DALAM PERJUANGAN MERAH KEMERDEKAAN INDONESIA." *Kewarganegaraan* 6.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2020. *Metode Penelitian Sejarah*. Edited by Priyo Sudarmo. 2nd ed. Yogyakarta: Magnum.
- Ivan Prapanca Wardhana, Muhadi, dan Ageng Sanjaya. 2019. "Keterlibatan Tentara Pelajar Pada

- Serangan Umum Empat Hari Di Surakarta Tahun 1949.” *Keraton* 1.
- Lailatul Munawaroh, Ira Miyarni, dan Sarkowi. 2022. “PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP PERKEMBANGAN MILITER SUMATERA SELATAN TAHUN 1942-1947.” *Kaganga* 5.
- Muhammad Faruq Jabbar Baihaqie dan Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd. 2018. “Pemikiran Dan Perjuangan Mohammad Sjafei (1926 - 1945).” *Risalah* 5 (2): 325–36.
- Rush, Siti Ismirat Purnama Sari. 2020. “Model Pembelajaran Mnemonik Bantu Siswa Mengingat Sejarah.” In .
- Setyahadi, Mulyer Mananda. 2018. “ANALISIS KONFLIK POLITIK ELITE TNI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966).” *Renaissance* 3.
- Supian, dan Lagut. 2020. “Pertempuran Kasiro-Sungai Pinang Batang Asai Menghadapi Agresi Militer Belanda II Di Kewedanaan Sarolangun 1948-1949.” *Keraton* 2.
- Susdarwono, Endro Tri. 2020. “Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia.” *Istoria* 16 (1): 1–18.
- Susilo, Agus. 2018. “Sejarah Perjuangan Jenderal Soedirman Dalam Mempertahankan Indonesia (1945-1950).” *Historia* 6.
- Widaningsih, Devi Ellok. 2018. “REORGANISASI DAN RASIONALISASI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DI JAWA TAHUN 1947-1949.” *Ilmu Sejarah* 3.
- Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, dan Budi Gustaman. 2018. “BKR (BADAN KEAMANAN RAKYAT): Cikal Bakal Tentara Indonesia?!” *Metahumaniora* 8.
- Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina. 2018. “DEMOKRASI DALAM SEJARAH MILITER INDONESIA; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945.” *Sosiohumaniora* 20.